

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI 2010  
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**Oleh : DEMIANUS AYA  
NIM : 080814020**

**ABSTRAK**

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Halmahera Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya dalam kampanye, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama. Dengan demikian, maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, sehingga untuk melihat keterkaitan tersebut mendorong penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini berlokasi di Halmahera Selatan disaat pilkada pada tahun 2010 berlangsung. Dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang dianggap mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang informasi yang terkait dengan topic penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama berperan aktif dalam memberikan nasihat, ceramah atau khotbah politik terhadap masyarakat ketika menjelang pilkada bupati. Peranan tokoh agama ini didasari dengan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkai membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam rangka turut aktif untuk berpartisipasi pada pilkada.

Bentuk partisipasi masyarakat masih menggunakan unsur primordialisme sebagai factor utama dalam menentukan pilihannya, maka suku terbesar lah yang menjadi pemimpin terpilih di daerah tersebut yang dalam hal ini adalah suku *Togale* (Tobelo-Galela).

***Kata Kunci : Peranan, Tokoh Agama, Partisipasi, Masyarakat***

## **I. PENDAHULUAN**

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. System ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang diharapkan. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten. Pada dasarnya Pilkada langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.

Masyarakat di Halmahera Selatan telah melakukan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam hal ini daerah kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan enam calon pasangan Bupati dan wakilnya. Halmahera Selatan dulunya kabupaten Maluku Utara tetapi kemudian diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah kabupaten Maluku Utara dengan ibu kotanya Sofifi berkembang menjadi daerah provinsi Maluku Utara dan dibagi menjadi enam kabupaten yaitu halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula, serta dua kota yaitu kota Ternate dan kota Tidore.

Dalam proses pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama merupakan sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, Tokoh agama punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu

merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengannya pilkada langsung yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pilkada langsung yang dilakukan.

Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi. Keberhasilan pilkada langsung tidak hanya diukur oleh penyelenggaranya yang lancar dan damai tetapi juga outcomes (manfaat/hasil) yang diperoleh apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Tetapi bisa saja pilkada langsung dilakukan hanya untuk ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme “voting” dari suara pemilih, sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengolah daerah, sekalipun kepala daerah jabatan politis dan tidak menuntut keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi sangat penting. Abdul (2005, 116).

Namun pilkada langsung hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk merebut suara pemilih. Ada indikasi kuat masing-masing kandidat segala cara termasuk yang dilarang seperti “money politic” untuk mendapat dukungan. Mereka juga tidak segan-segan mengeksploitasi masyarakat dan sentimen primordial untuk menarik simpati meskipun disadari bahwa cara itu kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan para kandidat untuk mendekati masyarakat lebih menonjolkan primordialisme. Hal itu tercermin dari ajakan untuk memilih dengan memakai sentimen kesukuan, agama, golongan, dan wilayah tertentu. Dari berbagai spanduk dan poster yang dipampangkan juga tergambar sebuah klaim dukungan terhadap calon tersebut dengan memakai bendera komunitas tertentu. Rozali (2005, 130).

Partisipasi masyarakat, pilkada langsung yang sudah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia masih tetap memerlukan upaya sosialisasi yang intensif agar potensi konflik yang membayangkannya dapat diredam atau diminimalisir. Sejalan dengan upaya itu dibutuhkan partisipasi masyarakat agar sosialisasi itu berjalan optimal dan efektif, sehingga pada gilirannya masyarakat daerah dapat menggunakan hak memilih kandidat kepala daerah secara lebih rasional dan obyektif. Kegiatan seorang dalam partai dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua

kegiatan sukarela melalui mana seorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat, atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya. Daniel dan Alvian (2002, 115).

Berdasarkan pra observasi di lokasi penelitian, menunjukkan kecenderungan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di desa atau kecamatan tertentu relatif tinggi, dan ada desa dan kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya relatif rendah. Masalah tersebut di atas besar kemungkinan salah satu faktornya adalah peran dari tokoh agama di desa dan kecamatan tertentu cukup tinggi dan di desa atau kecamatan tertentu relatif rendah. Hal ini dapat dilihat oleh perbedaan dari peran tokoh agama di desa dan kecamatan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan desa dan kecamatan lainnya

## **II. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **A. Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Soekanto (1984: 237) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Nasution (1994: 74 ) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986 : 29 ) berpendapat ”peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”.

Usman (2001 : 4 ) mengemukakan “ peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

## **B. Konsep Tokoh Agama**

Tokoh agama termasuk kekuatan politik dalam system politik, yaitu kita bisa melihat dalam struktur politik.

Dilihat dari tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, Soejono Soekanto (2000 ; 318) menurutnya kepemimpinan dibagi atas 2 bagian yaitu :

- a. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.
- b. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (informal leadership).

Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.

Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti : para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.

## **C. Konsep Partisipasi Politik**

Dewasa ini istilah partisipasi selalu muncul dan ramai dibicarakan baik itu pejabat pemerintah, kaum politisi maupun kelompok ilmuwan ketika mereka berbicara mengenai politik. Partisipasi politik menurut Nelson dikutip Ndraha (1987:102), mengatakan bahwa partisipasi ada dua jenis, yaitu :

1. Partisipasi horizontal, adalah partisipasi sesama warga atau anggota suatu perkumpulan.
2. Partisipasi vertikal, adalah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan. Antara klien dengan patron atau antara masyarakat sebagai perkumpulan dengan pemerintah.

Dalam menemukan makna yang lebih lengkap, maka yang hampir sama dengan pendapat di atas adalah tindakan sosial atau seperti yang disebut oleh Weber sebagai sosial-action. Istilah ini dikemukakan oleh Weber untuk perbuatan manusia yang mempunyai arti subjektif. Dengan ini dimaksudkan setiap orang dalam mencapai tujuan terdorong oleh motivasi yang menguntungkan.

Miriam Budiarjo (1982, 1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan kontanting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

H. NU dan Sidney Verba dikutip Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan pribadi yang legal, sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang teropong utama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas, tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otatatitatif masyarakat.

Sementara Herbert Mc. Closky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Hoogerwerf (1985:189) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan pada kebijaksanaan pemerintah dan pada terwujudnya kebijaksanaan itu. Dari berbagai pendapat di atas terlihat bahwa partisipasi politik mencakup aspek-aspek yang sangat luas termasuk juga tingkah laku politik dan pemilihan penguasa di dalam suatu kegiatan politik yang disebut pemilihan umum.

Pengertian umum mengenai partisipasi ini biasanya sederhana yaitu keikutsertaan suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan politik, misalnya : memilih pemimpin negara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai dan lain-lain. Alfian (1986, 70).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana peranan Tokoh Agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan.

Yang dimaksud dengan peranan tokoh agama dalam penelitian ini adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

Adapun dalam hal ini indikator dari tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Himbauan atau saran dari tokoh agama kepada masyarakat dalam menghadapi pilkada.
- b. Politik para tokoh agama dalam menghadapi pilkada seperti pidato/kampanye.
- c. Nasehat, misalnya masyarakat harus hati-hati agar tidak terpengaruh dengan *money politic* dalam memberikan suaranya.
- d. Petunjuk atau perintah agar masyarakat dapat aktif dalam pemilihan kepala daerah.

Sedangkan partisipasi politik masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dalam kegiatan politik dengan mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum oleh pemerintah kabupaten, dalam kegiatan ini antara lain, seperti memberikan usul, saran, pendapat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di kabupaten Halmahera Selatan.

Adapun indikator dari partisipasi politik masyarakat adalah:

- a. Memberikan suara dalam pemilihan
- b. Menghadiri rapat umum
- c. Menjadi anggota salah satu kelompok kepentingan
- d. Mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dengan demikian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005 : 171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ini ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian informan yang akan memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang



jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Adapun informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Masyarakat.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Parisipasi Politik Merupakan Sosialisasi Politik Dalam Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan**

Agama merupakan lembaga yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan melalui pengajaran dan pelaksanaan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para peletak dasar agama, dimana ajaran tersebut kemudian dituliskan dalam Kitab Suci masing-masing. Agama sebagai sebuah lembaga tentu menuntut adanya suatu susunan hirarki atau kepengurusan yang mendampingi dan melayani jemaat dalam usahanya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Para pengurus atau pimpinan jemaat dalam agama inilah yang kemudian disebut sebagai tokoh agama. Jadi tokoh agama adalah orang yang karena kualitas pribadinya dipercaya dan diberi tugas khusus untuk memimpin umat beragama.

Para tokoh agama memiliki tugas dan peran yang khas yaitu: Menjadi panutan atau memberi teladan bagi umatnya, khususnya di tengah situasi daerah yang diperhadapkan dengan pilkada langsung, menyejahterahkan umat Tuhan, Mendampingi umat dalam persatuan dengan Tuhan, dan memimpin ibadah, mengajar, mempersatukan, serta mendampingi dalam perwujudan iman.

Tokoh agama tampak antara lain dalam upaya pengarahan dalam sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum atau kampanye.

Dalam wawancara langsung dengan inisial D. N, tokoh agama bahwa: *Menjelang pilkada bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama selalu memberikan ceramah/Khotbah kepada jemaat/masyarakat dengan tujuan bahwa masyarakat harus turut aktif untuk berpartisipasi dalam pilkada bupati.*

Adapun pendapat dari inisial T. H, tokoh agama bahwa : *Ya, pada prinsipnya telah menjadi tugas dari pada tokoh agama dalam memberikan ceramah/dakwah terhadap masyarakat dalam menyambut pilkada, mengingat sebagian besar masyarakat kurang terlalu memahami tentang pentingnya pilkada yang mengakibatkan masyarakat tidak memberikannya terhadap kandidat yang ada atau yang kita kenal dengan namanya golput.*



Pendapat lain yang dikemukakan oleh inisial R. S, tokoh agama, yaitu : *Masalah pilkada sebenarnya bukanlah menjadi urusan tokoh agama, karena sesungguhnya ketika berbicara tentang pilkada secara tidak langsung kita berbicara tentang politik. Berbicara politik tentunya tidak terlepas dari unsure masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang kemudian merupakan urusan dari tokoh agama. Merupakan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkai mengarahkan dan perlu juga diberikan gambaran tentang pilkada dengan tujuan masyarakat tidak asal memilih setiap calon yang ada dan terlebih lagi dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik.*

Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa ceramah, dakwah, khotbah atau pesan politik yang dilakukan oleh tokoh agama terhadap masyarakat didasarkan pada tanggung jawab iman. Tanggung jawab inilah yang kemudian mendorong tokoh agama untuk memberikan ceramah, dakwa atau khotbah kepada masyarakat untuk turut aktif dalam pilkada bupati yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Peranan dari tokoh agama tersebut di atas secara tidak langsung telah melakukan sosialisasi politik. Karena sesungguhnya sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik.

## **B. Tanggapan Responden Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik**

Ada pun tanggapan responden terhadap peran (ceramah, dakwah, khotbah, pesan politik) tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik yang dikemukakan oleh inisial L. A, mahasiswa, bahwa:

*Ya, selalu ada ceramah, khotbah atau pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat menjelang pilkada. Dan menurut saya, apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu baik karena untuk kepentingan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya. Dengan adanya himbauan, ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan lebih aktif lagi dalam berpartisipasi pada pilkada.*

Pernyataan ini pulah dijawab oleh inisial H. B, warga, yang mengatakan: *Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab tokoh agama dalam membina dan mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang baik dalam hal ini adalah turut aktif dalam pilkada bupati. Oleh karena tugasnya dalam membina dan mengarahkan masyarakat maka selalu ada nasihat, ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada dilaksanakan. Namun dalam penyampaian*

*pesan politik atau ceramah kepada masyarakat, tokoh agama tidak pernah menyuruh untuk berpartisipasi pada salah satu calon tertentu. Dalam penyampaian ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat selalu netral. Hal yang sama disampaikan oleh inisial T. N, warga bahwa :*

*Ya, tokoh agama selalu memberikan ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada Bupati di kabupaten Halmehera Selatan. Dan menurut saya apa yg disampaikan tokoh agama itu patut dituruti karena itu merupakan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam penyampaian tersebut, tokoh agama selalu netral dan tidak menentukan calon mana yang harus dipilih. Tokoh agama memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih. Kemudian inisial T. A, warga, juga mengemukakan pendapatnya bahwa :*

*Ya, benar tokoh agama berperan aktif dalam memberikan ceramah, dakwa pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Sejauh ini yang saya tahu tokoh agama dalam menjelang tugasnya sebagai pemuka agama, selalu netral dalam mengarahkan masyarakat untuk menyambut pilkada dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu. Walaupun dalam kenyataannya ada salah satu calon Bupati yang membantu kami lewat bantuan dana untuk pembangunan fisik gedung Gereja, tetapi tokoh agama tidak menuntut kepada kami selaku jemaat/masyarakat untuk memilih calon Bupati yang telah membantu kami. Tokoh agama memberikan kehendak bebas untuk memilih calon bupati sesuai dengan pilihan kami.*

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa menjelang pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan tokoh agama berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pilkada. Adapun dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pilkada, tokoh agama selalu bersifat netral dan tidak menentukan calon mana yang harus dipilih. Tokoh agama memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih. Mengingat hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia.

Adapun dalam pemberian ceramah, nasihat, khotbah atau pesan politik merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh para tokoh agama. Hal ini disebabkan karena sebagian kecil masyarakat tidak terlalu peduli dengan adanya pilkada bupati yang menurut mereka hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan sesuatu apapun, demikian kata inisial D. B, warga. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dalam menjelang pilkada masyarakat perlu diberi ceramah, khotbah, atau pesan politik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti *golput* dan *money politic*. Oleh beberapa responden berikut

mengatakan sangat penting pemberian ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada, diantaranya adalah inisial N. K, mahasiswa yang mengatakan bahwa :

*Merupakan hal yang sangat penting ketika tokoh agama memberikan ceramah, dakwa, khotbah, atau pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Pada umumnya masyarakat yang ada di kabupaten Halmahera Selatan merupakan masyarakat awam yang masih kurang pemahaman tentang politik maupun partisipasi. Oleh karena itu sangat penting memberikan ceramah, dakwah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan mau berpartisipasi dalam pilkada. Mengingat di mata masyarakat tokoh agama merupakan seorang individu yang patut diteladani dan dicontohi. Jadi apapun yang dikatakan para tokoh agama, pasti akan dituruti.*

Pernyataan ini pula dijawab oleh inisial Y. A, tokoh masyarakat, bahwa :

*Ya, penting sekali bagi masyarakat untuk diberi ceramah, dakwa, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Dengan adanya ceramah, dakwah khotbah atau pesan politik dari tokoh agama, masyarakat dapat mengerti pentingnya pilkada bagi kehidupan masyarakat. dan ketika masyarakat mengerti pentingnya pilkada, maka dengan sendirinya masyarakat akan turut aktif untuk berpartisipasi dalam pilkada. Dalam waktu bersamaan inisial H. D, warga mengatakan bahwa : Menurut saya, selagi ceramah, khotbah atau pesan politik yang disampaikan oleh para tokoh agama selagi masih bersifat netral itu penting untuk dilakukan atau diikuti. Dan selama ini tokoh agama dalam pemberian ceramah tersebut masih bersifat netral, dan itu merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam memasuki pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan bupati.*

Berdasarkan jawaban dari responden di atas dapat menggambarkan bahwa betapa pentingnya peranan tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena dengan adanya ceramah, khotbah politik atau bahkan pesan politik dari tokoh agama dapat menimbulkan kesadaran dari tiap jemaat/masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada bupati.

### **C. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan**

Pemilihan kepala daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintah setelah digulirkan Otonomi Daerah di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah. Hal ini jika dilihat dari perspektif desentralisasi, pilkada tersebut merupakan terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan di tingkat lokal.

Pada dasarnya pilkada merupakan pememilihan kepala daerah yang profesional, legitimate dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi.

Masyarakat di Halmahera Selatan telah melakukan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam hal ini adalah daerah kabupaten yaitu Bupati dan wakil Bupati, pada tanggal 10 Oktober 2010 yang diikuti enam pasangan calon Bupati dan wakilnya, yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. Rusdan I. Haruna, M.Si.

Bertolak dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan Bupati dan Wakilnya cenderung diwarnai dengan beberapa alasan masyarakat untuk memilih calon tersebut, diantaranya adalah alasan karena kesamaan etnis, karena kedekatan keluarga, karena kemampuannya, karena kesamaan agama, karena partai politik, karena nasihat dari para tokoh agama dan karena ada jaminan masa depan yang diberikan. Dari hasil observasi ini kemudian penulis melakukan penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang masyarakat untuk dijadikan responden, diantaranya adalah inisial R. B, warga bahwa:

*Kalau saya memilih seorang calon bupati, hal yang paling utama ialah karena calon tersebut sama suku dengan saya, kemudian calon tersebut seiman juga dengan saya. Lebih dari itu calon tersebut memiliki visi dan misi yang jelas. Kemudian menurut inisial H. Y, warga bahwa :*

*Kalaupun saya memilih seorang calon Bupati itu karena visi misi yang jelas, kemudian suku dan agama. Menurut saya ini penting karena ketika calon tersebut berhasil, maka hal yang utama dia akan memperjuangkan suku dan agama terlebih dahulu. Kemudian persoalan tokoh agama yang memberikan dorongan*

*kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan itu benar, tetapi tokoh agama pada umumnya memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih calon bupati. Dan saya pikir, apa yang disampaikan oleh para tokoh agama itu benar, persoalan pilihan itu hak masyarakat yang tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun. Tokoh agama hanya mengarahkan dan memberikan pandangan kepada masyarakat dan selanjutnya merupakan hak dari masyarakat calon mana yang menurutnya patut untuk dipilih. Di tempat berbeda juga dikemukakan oleh inisial L. A, Mahasiswa, bahwa :*

*Dalam menentukan pilihan kepada salah satu calon tertentu saya melihat dari sudut pandang kemampuan untuk memimpin yang dimiliki oleh setiap calon tertentu dan kemudian jaminan masa depan yang diberikan. Era sekarang ini, menurut saya ketika memilih seorang bupati janganlah kita melihat karena dia memiliki kekuatan finansial yang memadai tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin dan terlebih lagi tidak mampu membawa daerah ini ke tujuan yang sesungguhnya yakni kesejahteraan masyarakat pada umumnya.*

*Pernyataan ini juga dikemukakan oleh inisial N. T, warga yang mengatakan bahwa : Alasan untuk saya memilih seorang bupati itu karena dilihat dari kemampuan untuk memimpin dan punya visi misi yang jelas untuk membawa daerah ini mampu bersaing dengan daerah lain. Disamping itu juga saya melihat latar belakang kehidupan calon tertentu apakah mempunyai gaya hidup yang terpuji atau tidak. Karena latar belakang kehidupan yang terpuji dapat menunjang untuk melakukan hal-hal terpuji juga dalam membangun daerah ini dan mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat pada umumnya.*

*Kemudian inisial A. G, tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa: Alasan utama ketika saya memilih seorang bupati itu yaitu karena latar belakang suku dan agama yang sama dengan saya. Setelah itu mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mampu membawa daerah ini sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan terlebih lagi amanat UUD 1945 itu dapat terealisasi dengan baik, yakni mensejahterahkan kehidupan yang berbangsa dan bernegara.*

Dari pernyataan responden tersebut di atas, menunjukkan bahwa partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Hal itu dapat dilihat dari alasan responden dalam memilih calon bupati, yang pada umumnya unsur SARA (suku, agama dan ras) yang menjadi prioritas utama untuk memilih calon bupati. Ini disebabkan karena daerah kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya berpenduduk yang menjunjung tinggi nilai-nilai sukuisme. Adapaun suku *Togale (Tobelo-Galela)* merupakan suku terbesar yang menduduki kabupaten Halmahera

Selatan, kemudian disusul suku-suku kecil lainnya yakni suku *Makian*, suku *Bajo* dan *Buton*. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya Dr. H. Muhammad Kasuba, S.Ag, MA sebagai bupati kabupaten Halmahera Selatan dalam dua periode berturut-turut yang notabene adalah suku *Togale*. Kemudian agama dan ras yang selalu mendominasi untuk dijadikan alasan dalam memilih seorang bupati. Hal ini diyakini bahwa siapa pun dia ketika disinggung soal agama, semua pasti akan membelah agamanya.

Setelah unsur SARA, kemampuan serta visi dan misi merupakan alasan untuk memilih seorang bupati. Ini disebabkan karena cara berpikir masyarakat yang mulai berkembang dan pendidikan yang sudah meningkat. Kemudian jaminan masa depan yang diberikan oleh para kandidat. Ini berarti ada janji-janji politik dari kandidat dalam berkampanye.

Kesimpulan yang ditarik dari uraian tersebut di atas adalah bahwa pemilihan kepala daerah di kabupaten Halmahera Selatan unsure SARA yang mendominasi partisipasi masyarakat untuk memilih serta tidak terlepas dari peran tokoh agama dalam memberikan ceramah, khotbah politik atau bahkan pesan politik kepada masyarakat. Sehingga realita yang terjadi suku terbesar lah yang memimpin daerah kabupaten Halmahera Selatan, yakni suku *Togale* (*Tobelo-Galela*) yang dalam hal ini adalah Dr. H. Muhammad Kasuba, S.Ag, MA yang notabena adalah suku *Togale* telah memenangkan pilkada dua kali secara berturut-turut.

Dengan adanya pelaksanaan pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan akan membawa harapan baru bagi segenap elemen masyarakat untuk kiranya dapat tercipta suatu kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik. Menurut inisial H. B, warga : *Ya, ketika pilkada Bupati terlaksana menurut saya akan terciptanya suasana kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik.* Begitu pun dengan inisial T. N, LSM, yang mengatakan bahwa :

*Dalam pelaksanaan pilkada Bupati tentunya akan berdampak pada perubahan yang nantinya akan tercipta kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik, mengingat perkembangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah selalu ketat dalam menjalani roda pemerintahan.*

Hal ini juga disampaikan oleh inisial L. A, mahasiswa yang mengatakan bahwa : *Terlaksananya pilkada di Kabupten Halmahera Selatan akan tercipta suasana kehidupan sosial politik dan ekonomi. Dimana dapat memudahkan hubungan kinerja pemerinta pusat dan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah terhadap masyarakat khususnya di kabupaten Halmahera Selatan.*

Hal ini dikarenakan masyarakat yakin bahwa calon yang jadi nanti mampu membawa masyarakat ke dalam suasana yang demikian. Pelaksanaan Pilkada Bupati merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut berinisial L. A, warga, bahwa :

*Penting sekali bagi masyarakat untuk dilakukannya pilkada Bupati, karena secara tidak langsung dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pemerintah dan*

Bertolak dari jawaban responden di atas hasil penelitian menunjukan masyarakat menyatakan penting untuk dilakukannya pilkada langsung di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan yang dikemukakan, antara lain :

- Merupakan upaya mewujudkan demokrasi local dimana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin menurut keinginannya
- Pengambilan atau wujud dari pada kedaulatan rakyat pada tingkat local
- Mendidik masyarakat menentukan pimpinannya, sesuai dengan hati nuraninya
- Untuk memilih pemimpin yang mampu merubah daerah yang lebih baik
- Karena menurut UU masa jabatan Bupati hanya 5 tahun, jadi setelah itu harus dipilih kembali
- Karena tidak mungkin terus hidup dalam kekosongan (tanpa pemimpin) dan oleh karena itu harus secepatnya mengisi kekosongan itu untuk mengatur dan menentukan Halmahera Selatan ke depan
- Agar terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Halmahera Selatan
- Karena daerah pemekaran harus ada kepala daerah oleh karena itu pilkada harus ada
- Secara umum adalah menjalankan amanat UU
- Secara khusus adalah menjadi jaminan terciptanya kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik
- Pilkada merupakan sarana dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam menghargai hak-hak dari pada rakyat tanpa adanya intervensi apapun dengan kepentingan terselubung.

Dalam pencalonan kepala daerah selalu saja dilakukan kampanye oleh para kandidat untuk mensosialisasikan setiap visi dan misi mereka guna menarik perhatian dan simpatisan dari pada masyarakat. Di dalam masa kampanye para kandidat calon kepala daerah dan masyarakat berkesempatan bertemu langsung dan saling berdialog tentang visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kandidat dan harapan dari masyarakat.



*Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan senang mengikuti rapat umum, dialog atau kampanye karena mereka ingin mendengar langsung setiap visi dan misi yang disampaikan oleh calon tertentu, namun ada juga yang mengaku tidak senang mengikuti rapat umum, dialog atau kampanye karena kesibukan mereka yang sebagian besar adalah petani. Jadi mereka berpikir dari pada mereka harus duduk-duduk diam mendengarkan para calon bupati tanpa mendapat sepeserpun uang, lebih baik mereka bekerja di kebun yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelanjutan hidup mereka.* Kata inisial E. N, warga Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Dan kemudian pernyataan ini dibenarkan oleh inisial A. S, kepala Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Para tokoh agama mempunyai peran dalam pilkada langsung di Kabupaten Halmahera Selatan, itu kita bisa lihat dari ceramah, dakwah, khotba yang diberikan oleh tokoh agama dalam sebulan menjelang pilkada. Adapun peran dari Para tokoh agama ini dilakukan atas dasar tanggung jawab iman terhadap masyarakat sehingga merasa penting untuk memberikan nasihat politik kepada masyarakat agar tidak terpengaruh pada *money politic* dan *golput*.
2. Tidak ada nasihat yang diberikan tokoh agama kepada masyarakat cenderung pada calon tertentu.
3. Partisipasi masyarakat kabupaten Halmahera Selatan dalam pemilihan kepala daerah, unsur SARA menjadi prioritas utama untuk dijadikan alasan memilih seorang bupati, sehingga mengakibatkan suku terbesar lah yang menjadi pemimpin di daerah tersebut yang dalam hal ini adalah suku *Togale* (Tobelo-Galela). Akan tetapi disamping unsure SARA, tokoh agama juga turut berperan dalam mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan melalui ceramah, dakwah, khotbah politik atau nasihat politik.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya pemberdayaan politik masyarakat, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan politik, melalui event-event politik dalam lingkup yang lebih kecil.

2. KPUD dan pemerintah harus berupaya agar kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya berdemokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat turut aktif dalam berpartisipasi dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.
3. Kepala daerah yang terpilih pada pemilihan dalam bekerja jauhkanlah korupsi dan bangun Kabupaten Halmahera Selatan dengan penuh tanggung jawab
4. Melalui pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati, aktivitas-aktivitas politik mengalami perubahan, dari elemen masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas kini semakin giat dalam aktivitas politik, dengan berbagai macam perilaku politik yang terkadang bisa membawa dampak bagi proses politik atau bagi kehidupan masyarakat. Disarankan agar melalui pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati, kemampuan dan kualitas para calon terus ditingkatkan pemahaman tentang peraturan pilkada langsung dan sistem politik yang dibangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta dapat memberikan pendidikan politik dalam pemilihan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Huntington, P. Samuel dan Nelson Joan, 1986, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kantaprawira, Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung.

Merdalis, drs. 2006. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta

Merson H.E 1976. *Adminitrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Naptilu, Paimin.DR, M.Si. 2007. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Alumni, Bandung

Poerwadarminta 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama. Jakarta

Prof. DR. Toha, Mifta, MPA. 2006. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press

Sarudajang, S. Harry, Dr. 2012. *Pilkada Langsung*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Simangunsong, Bonar. Ir. Drs, MSc. SE dan Sinuraya, Daulat. Ir, MM. 2004. *Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Kharisma Virgo Print, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

***Sumber-Sumber Lain :***

Skripsi : Kinerja DPRD di Bidang Pengawasan Pembangunan, Oleh Jeklin Gorab, Fisip Unsrat 2008

Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, Tentang **Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang **Pemerintah Daerah**

Internet, [google@www.maluku utara](http://www.malukuutara).